

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah koperasi di Indonesia tergolong tinggi, tetapi tidak sedikit juga yang kegiatannya Pasif. Hampir 81.686 koperasi dibubarkan karena dalam empat tahun terakhir terindikasi pasif. Suatu koperasi dianggap aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam tiga tahun terakhir. Hingga pada akhir tahun 2019, jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 123.048 unit dengan jumlah total anggota 22.463.738 orang.

Koperasi tidak dapat dilepaskan dari UMKM, bahkan nantinya pelaku UMKM diarahkan menjadi anggota koperasi. Sebaliknya, anggota koperasi yang aktif saat ini didorong untuk menjadi pelaku UMKM, terutama yang bergerak dalam lini sektor ekonomi unggulan seperti pangan, komoditas, maritim, pariwisata, dan industri pengolahan.

Secara spasial, jumlah koperasi aktif di Jawa sangat tinggi, yaitu di atas 10.000 unit per provinsi. Tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah koperasi aktif mencapai 21.757 unit. Sedangkan di Sumatera, umumnya memiliki jumlah koperasi aktif antara 1.000 hingga 5.000 unit per provinsi, kecuali Kepulauan Bangka Belitung (631 unit) dan Kepulauan Riau (884 unit). Provinsi lain yang jumlah koperasi aktifnya tidak mencapai 1.000 unit adalah Gorontalo (884 unit), Sulawesi Barat (837 unit), Papua Barat (608 unit) dan terkecil di Kalimantan Utara (476 unit). (*slamet, 2020*)

Untuk jumlah koperasi pada tahun 2019-2020 terdapat kenaikan pada tahun 2020. Untuk tahun 2019 hanya berjumlah 123 048 sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 127 124. Namun juga terdapat banyak masalah yang dihadapi oleh koperasi di Indonesia adalah yaitu minimnya jumlah partisipasi masyarakat untuk bergabung di koperasi, jumlah partisipasi yang gabung ke koperasi hanya terhitung 8,41 persen. Menurut angka ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan persentase di negara lain. (*badan pusat statistie, 2018-2020*)

Isu yang sering terjadi pada koperasi di Indonesia yaitu yang pertama adalah Anggota yang tiba-tiba pindah koperasi dan koperasi itu akan mengalami kerugian dan berkurangnya anggota. Pimpinan maupun staf-staf harus pintar-pintar membuat para anggota kita betah dan nyaman dengan pelayanan yang ada, maka dari itu staf-staf yang berada di koperasi tersebut bisa saling menjalin komunikasi dengan baik. Bahkan bisa menerapkan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan.

Dan isu yang kedua adalah Lemahnya Partisipasi Anggota yang menjadikan anggota menjadi hal penting dalam organisasi koperasi. Akan tetapi tidak semua anggota dapat menjalankan perannya untuk berpartisipasi secara aktif sebagai seorang pemilik maupun sebagai seorang pelanggan. Bahkan tidak jarang anggota koperasi yang tidak mengetahui peran atau kedudukan yang dimilikinya sebagai anggota koperasi. Hal tersebut sangatlah disayangkan apabila tidak dipergunakan dengan baik mengingat keberhasilan dari koperasi dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi anggota dalam menjalankan perannya sebagai anggota koperasi. Namun minimnya partisipasi bukanlah kesalahan mutlak dari anggota tetapi ada

factor lain yang mempengaruhi kurangnya partisipasi anggota salah satunya adalah ketidak pahamnya anggota terhadap perannya di dalam koperasi atau organisasi koperasinya yang belum dapat memberikan pelayanan atau fasilitas seeara maksimal kepada anggota sehingga dapat menimbulkan rasa “enggan” bagi anggota untuk menjalankan peran anggotanya. Dengan mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota, organisasi koperasi dapat menentukan strategi strategi yang dapat merangsang partisipasi anggota dalam menjalankan perannya.

Untuk isu yang ketiga yaitu kurangnya modal dan dana dalam koperasi simpan pinjam yang merupakan masalah yang sangat umum diperkoperasian di Indonesia kurangnya modal membuat jalannya koperasi tidak sesuai harapan bahkan akan maeet ditengah jalan disini anggota serta pengawas koperasi perlu melakukan langkah eerdas, berimprovisasi dan berinovasi untuk mengatasi masalah kurangnya modal. Hal ini mempunyai beberapa penyebab diantara nya :

1. Kelemahan dalam pembentukan modal sendiri yang seharusnya koperasi meningkat SHU sebesar mungkin
2. Kelemahan dalam menarik modal dari luar organisasi yanh seharusnya koperasi memberikan eitra baik agar masyarakat pereaya dan bisa ikut berpartisipasi dalam memajukan perkembangan koperasi di Indonesia
3. Kurangnya inisiatif dan upaya sendiri untuk meningkatkan permodalan karena pada saat ini banyak yang masih bergantung pada subsidi permodalan yang berasal dari pemerintah.

Isu yang ke-empat yaitu Pembagian SHU yang tidak jelas arahnya, seringkali pembagian SHU dalam koperasi simpan pinjam banyak menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan status keanggotaan dalam koperasi simpan pinjam tersebut.

Isu yang selanjutnya adalah SDM (sumber daya manusia) yang rendah yang dapat menjadi permasalahan yang dihadapi Koperasi dalam menjalankan usahanya, sesuai dengan pendapat *trisnawani (2009:2)* yang menyebutkan bahwa Sumber Daya Manusia sebagai salah satu faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kemampuan Koperasi dalam menjalankan usahanya.

Koperasi di Indonesia diatur didalam Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992, dimana koperasi memiliki fungsi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan atas asas kekeluargaan dan merupakan Badan Usaha, sehingga Koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Koperasi pun menjadi soko guru perekonomian Indonesia, landasan koperasi ialah Pancasila UUD 1945. Asas koperasi bukan hanya saja tentang kekeluargaan tetapi juga berdasarkan ekonomi dan Gotong Royong.

Dijelaskan Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1). Dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, bahwa koperasi adalah gerakan ekonomi masyarakat maupun sebagai badan usaha yang berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah dan seluruh rakyat bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan

dengan perkembangan keadaan perlu kembali mengatur ketentuan tentang Perkoperasian dalam suatu Undang-undang.

Pada umumnya Koperasi juga memerlukan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan kopeasi agar pihak koperasi dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik yang sesuai dengan tujuan koperasi ada umumnya.

Terdapat 5 indikator utama kinerja koperasi yaitu:

1. Mengukur kinerja koperasi ada pada penerapan prinsip koperasi. Prinsip koperasi itu harus diterapkan seeara konsisten, karena akan menjadi pembeda antara koperasi dengan badan usaha non koperasi.
2. Terdapat pada kesamaan kepentingan usaha atau ekonomi anggota. Koperasi itu didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki aktivitas usaha atau kepentingan ekonomi, bukan orang yang tidak jelas kepentingan ekonominya.
3. Komitmen anggota koperasi. Isu sentral koperasi berada pada komitmen anggota, yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari trilogi koperasi yaitu, dimiliki, digunakan, dan dikontrol oleh anggota. Untuk implementasinya sendiri bisa di ukur ketika anggota menjalankan kewajiban dan haknya seeara benar, baik dengan kontribusi seeara finansial maupun non finansial.
4. Mengenali pelayanan, dimana hubungan usaha koperasi kepada anggotanya bersifat pelayanan bukan hanya bersifat transaksi jual beli

biasa. Besarnya balas jasa usaha anggota ke koperasi menjadi penentu selisih hasil usaha yang dikembalikan ke anggota.

5. Indikator kinerja utama koperasi adalah kerjasama. Kerjasama diperlukan oleh semua pihak baik dari pihak pendiri, pengurus, hingga anggota-anggotanya. Kesedian dan kemauan setiap individu untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama merupakan poin yang sangat penting.

(komida, 2019)

Sebagai pedoman umum dalam mengetahui kinerja keuangan, maka diperlukan laporan keuangan yang diterbitkan oleh koperasi, sehingga dapat diketahui keberhasilan maupun permasalahan yang dicapai koperasi dalam pengelolaan keuangannya. Pada hakikatnya laporan keuangan merupakan suatu daftar finaneial yang berkaitan langsung dengan posisi keuangan dan operasi keuangan unsure yang berkaitan dengan aktiva, kewajiban, dan ekuitas.

Sebaliknya unsure yang berkaitan dengan pengukuran kopeeasi keuangan adalah pendapatan dan biaya yang tereermin dalam laporan laba/rugi bersih koperasi. Analisis laoran keuangan meneakup pengaplikasian berbagai alat dan teknik analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka untuk memperoleh ukuran dan hubungan yang berarti dan berguna dalam proses pengambilan keputusan.

Pentingnya proses penyusunan serta analisis laporan keuangan yang dikeluarkan oleh koperasi harus memberikan informasi dan kondisi keuangan koperasi akan tetapi laporan tersebut perlu adanya analisis terlebih dahulu dengan alat analisis laporan keuangan yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang

lebih berguna dan lebih spesifik dalam menjelaskan posisi keuangan. Salah satu alat untuk mengukur keuangan koperasi dengan menggunakan teknik analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan tersebut adalah merupakan alat yang digunakan untuk melihat kondisi keuangan koperasi dan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan dari suatu periode ke periode berikutnya. Cara untuk menilai kinerja keuangan koperasi dengan melihat dari : Permodalan, Kualitas aktiva produktif, Manajemen, Efisien, Likuiditas.

Menurut riset yang saya baca bahwa koperasi masih harus diteliti dikarenakan masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi karena lemahnya partisipasi dari anggota sehingga anggota tidak bisa berperan dengan baik dan kurangnya modal/dana dalam koperasi simpan pinjam yang membuat koperasi tidak sesuai harapan bahkan akan macet ditengah jalan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa maju mundurnya badan usaha koperasi adalah sangat ditentukan sekali dari para anggotanya. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesadaran dan kehendak secara bebas. Didalam koperasi dijunjung tinggi asas persamaan derajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam keanggotaan koperasi dikenal adanya sifat bebas, sukarela dan terbuka. Di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No.25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.

Koperasi mempunyai tujuan yang berorientasi pada kebutuhan para anggotanya, sama halnya dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dhaya Harta (KPRI Dhaya Harta) kabupaten Jombang yang merupakan salah satu

koperasi terbesar di Jombang dan perkembangannya selalu baik setiap tahunnya. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah suatu badan usaha koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri atau dapat diartikan pegawai pemerintah yang berada di luar politik, bertugas melakukan administrasi pemerintah berdasarkan perundang-undangan yang ditetapkan .

KPRI Dhaya Harta merupakan koperasi besar yang mempunyai empat unit usaha yang semuanya berjalan dengan baik. Unit-unit usaha tersebut yaitu unit usaha simpan pinjam, unit usaha perumahan, unit ibadah haji, bidang usaha, realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Saat ini unit usaha yang paling berkembang adalah unit usaha simpan pinjam, karena unit usaha simpan pinjam ini sangat besar manfaatnya bagi anggota di bandingkan unit usaha lainnya. Selain itu unit simpan pinjam juga menjadi penopang dari unit-unit usaha yang lainnya, dimana dari awal berdirinya KPRI Dhaya Harta Jombang yang pada awalnya hanya memiliki satu usaha yaitu pada unit simpan pinjam ini saja, hingga sampai sekarang yang mampu memiliki empat unit usaha tersebut. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini yaitu di KPRI Dhaya Harta Jombang adalah karena koperasi ini merupakan salah satu koperasi yang eukup besar dan perkembangannya eukup baik, dimana hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya jumlah anggota, modal dan juga tingginya nilai simpanan maupun pinjaman yang ada di unit usaha simpan pinjam koperasi ini, hal tersebut sejalan dengan tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi Kpri Dhaya Harta di Jombang ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas

Koperasi sebagai perusahaan (*cooperative enterprise*) memerlukan penilaian kinerja sesuai dengan prestasi yang diraihinya secara periodik, mengingat keberhasilan usaha koperasi akan menentukan tingkat kesehatan usahanya. Hal ini dimaksudkan agar koperasi dalam melakukan kegiatan operasional usaha baik pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan jatidiri koperasi sesuai dengan prinsip kehati – hatian sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar – besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya (Afandi, 2014:26)

Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya terlebih dahulu kemudian mensejahterakan masyarakat. Selain itu, koperasi juga ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian bangsa. Landasan adalah tumpuan dasar atau aeuhan dasar yang harus dimiliki melakukan sesuatu. Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, dan peran serta kedudukan koperasi sebagai pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi di Indonesia.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan, diantaranya rasio likuiditas, rasio salvabilitas, rasio aktivitas dan profitabilitas/rentabilitas. Khususnya dalam penelitian ini, berkaitan dengan data yang diperoleh untuk rasio aktivitas selama periode pengamatan tidak memenuhi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis didalam hal ini ingin mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DHAYA HARTA (KPRI DHAYA HARTA) “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisa kinerja keuangan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dhaya Harta (KPRI DHAYA HARTA)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi KPRI DHAYA HARTA di Jombang ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas.

1.4 Manfaat

Dari penelitian ini diharapkan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian dan khususnya analisis laporan keuangan dan sebagai pembelajaran penerapan teori yang telah

diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan realita yang ada di dunia nyata.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Koperasi

Untuk bagi koperasi sendiri adalah Sebagai masukan bagi manajemen koperasi untuk mengetahui apakah efisiensi serta efektivitas perkembangan koperasi yang pada akhirnya berguna bagi perbaikan penyusunan laporan keuangan, rencana atau kebijakan yang dilakukan di waktu yang akan datang.

b. Bagi Penulis

Untuk bagi penulis tentunya untuk menambah pengetahuan, ilmu dan wawasan agar mengetahui cara menganalisis kinerja keuangan koperasi yang diperoleh dari hasil penelitian.

c. Bagi Pembaca

Memberikan tambahan referensi wawasan, ilmu serta pengetahuan bagi pembaca dalam mengaplikasikan dalam kehidupan nyata.

